



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL**

---

---

*Konferensi Pers Komunikadu Imprensa*

*Periode Oktober 2010*

*Edisi, 22 Oktober 2010*

**JSMP mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Timor-Leste**

Pada tanggal 22 Oktober 2010, JSMP berkesempatan untuk bertemu dan beraudensi dengan Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Dr. Jóse Ramos Horta. Pertemuan dan audensi ini dilangsungkan di Istana Kepresidenan, di Rua Prezidente Nicolau Lobato-Aitarak Laran pada pukul 2.30 WTL. Hadir dalam pertemuan tersebut dari team JSMP terdiri dari 6 orang dan dari kantor kepresidenan, selain Presiden sendiri, hadir juga kepala kantor kepresidenan dan satu orang staff lainnya.

Walaupun seringkali, JSMP memiliki pendapat dan sikap yang berbeda dengan Presiden, namun Presiden merupakan lembaga kedaulatan tertinggi yang memiliki fungsi penting dalam memastikan berfungsinya lembaga-lembaga demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. Oleh karena itu, sangat penting bagi JSMP untuk bertemu dan mendiskusikan isu-isu terkait dan posisi JSMP secara langsung dengan Presiden, kata Luis de Oliveira, Direktur JSMP.

Inisiatif pertemuan ini datang dari JSMP, yang mencoba melakukan pendekatan kepada Presiden untuk menyampaikan pandangan JSMP mengenai perihal yang berhubungan dengan Kewenangan Presiden mengenai pengampunan yang seringkali membingungkan publik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan dan pembangunan sistem hukum di Timor Leste.

Dalam kesempatan ini, JSMP menyampaikan usulan JSMP mengenai perihal ‘pengampunan’ yang sebelumnya juga telah diajukan ke Menteri Kehakimana. \*

---

\* Sebelumnya pada tanggal 08 bulan Oktober JSMP telah mengajukan sebuah usulan mengenai perihal kewenangan Presiden atas “pengampunan” kepada Menteri Kehakimana, Dra Dra. Luçia Maria B. Lobato.

Setelah mendengarkan pengenalan secara ringkas mengenai identitas dan peranan JSMP di sektor peradilan, pandangan JSMP mengenai perihal pengampunan, keadilan untuk kasus kejahatan berat masa lampau, dan permintaan JSMP kepada Presiden untuk mendukung kerja dan peranan sektor peradilan dan institusi-institusi hukumnya, Presiden kembali menekankan kebijakan, sikap dan filosofinya mengenai keputusan selaku kepala Negara mengenai pengampunan dan politik Negara Timor Leste mengenai kejahatan masa lalu.

Seperti biasanya Presiden tetap mempertahankan kebijakan politiknya atas segala hal yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden di Negara ini. Menurut Presiden bahwa apa yang beliau lakukan untuk mendirikan stabilitas, memperkuat semangat rekonsiliasi dan menjalankan politik dengan rasio dan kecerdasan intelektual.

Jika dirujuk secara spesifik mengenai politik dan keputusan mengenai perihal pengampunan, Presiden menegaskan bahwa dia telah mengadakan konsultasi dengan semua pihak dan mayoritas dari perwakilan partai politik. Keputusan tersebut merefleksikan keyakinan dan filosofi sebagai Presiden untuk menutup lembaran kejahatan 2006 dan 2008.

Walaupun, tetap ada perbedaan pandangan dan posisi antara JSMP dan Presiden, namun pada akhirnya Presiden mengatakan bahwa ia bersedia untuk mengunjungi JSMP di suatu waktu tertentu jika JSMP mengundang beliau.

Sementara JSMP, merasa sangat berbahagia atas kesempatan untuk mentangani dan menyampaikan pandangan JSMP secara kepada Presiden.

Menurut rencana, JSMP akan melakukan pendekatan dengan semua badan berdaulat Negara untuk mendiskusikan isu-isu seputar sektor peradilan dan menghimbau agar semua orang melakukan upaya kolektif untuk memperkuat sektor peradilan yang kredibel untuk menjadi landasan dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Timor Leste.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: +670 3323883 ka +670 7295795